

Implementasi Si Ida dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo

Oryza Puri Dyah Puspita¹, Herwan Parwiyanto²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: oryzap@student.uns.ac.id

Abstrak

Pelayanan publik berbasis digital merupakan bagian dari transformasi birokrasi modern yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo mengembangkan Sistem Perizinan Dalam Jaringan (Si Ida) sebagai bentuk penerapan e-government untuk mendukung inovasi pelayanan perizinan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Si Ida dalam pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Si Ida telah berhasil diimplementasikan namun ada beberapa aspek yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020–2025 yang mencapai kategori “Sangat Baik” dengan nilai 96,42 pada tahun 2025. Faktor pendukung implementasi mencakup dukungan kebijakan, kesiapan infrastruktur teknologi, serta sikap positif pelaksana. Sementara itu, kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi sistem yang belum sepenuhnya maksimal. Temuan penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi integrasi sistem agar Si Ida dapat memberikan pelayanan publik yang lebih responsif, cepat, dan efektif.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; pelayanan publik; e-government; perizinan; Si Ida

Abstract

Digital-based public service delivery represents a strategic component of public sector transformation aimed at improving effectiveness, efficiency, and transparency. The Investment and One-Stop Integrated Service Office (DINPMPTSP) of Purworejo Regency developed the Online Licensing System (Si Ida) as an implementation of e-government to support service innovation in the regional licensing process. This study aims to analyze the implementation of Si Ida in public service delivery and identify supporting and inhibiting factors using Van Meter and Van Horn's policy implementation model. This study employed a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of Si Ida has progressed well, although not yet fully optimal. This is reflected in the improvement of the Public Satisfaction Index (IKM) between 2020 and 2025, reaching the “Very Good” category with a score of 96.42 in 2025. Supporting factors include policy support, technological infrastructure readiness, and positive implementer disposition. Meanwhile, inhibiting factors include limited human resources, low digital literacy among users, and system optimization challenges. The study recommends strengthening the

capacity of human resources, increasing public outreach and education, and enhancing system integration to improve the effectiveness, responsiveness, and accessibility of Si Ida services.

Keywords: *Public service; policy implementation; e-government; licensing system; Si Ida*

Pendahuluan

Transformasi pelayanan publik berbasis digital merupakan agenda strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik secara optimal, yang pada akhirnya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Djoko, 2020). Dalam konteks tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan pembaruan sistem pelayanan, khususnya pada sektor perizinan yang memiliki peran strategis dalam mendukung investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pelayanan perizinan yang berbelit, tidak efisien, dan minim transparansi berpotensi menghambat realisasi investasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Silalahi (2019) menegaskan bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik sering tercermin dari tingginya keluhan masyarakat, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar pelayanan dengan harapan pengguna layanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan inovasi pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Sejalan dengan kebijakan nasional mengenai reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan inovasi pelayanan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo merespons tuntutan tersebut dengan mengembangkan Sistem Perizinan Dalam Jaringan (Si Ida) sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis e-government. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik diyakini mampu meminimalkan praktik diskriminasi, ketidakefisienan waktu dan biaya, serta potensi penyimpangan dalam proses pelayanan (Marlina, 2017).

Si Ida dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat waktu pelayanan bagi masyarakat. Implementasi sistem ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mendukung tatanan smart city. Namun demikian, inovasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh proses implementasi kebijakan di tingkat organisasi pelaksana.

Secara empiris, penerapan Si Ida menunjukkan capaian positif yang tercermin dari peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan DINPMPTSP Kabupaten Purworejo pada periode 2020–2025 yang berada pada kategori “sangat baik”. Kendati demikian, capaian kuantitatif tersebut tidak serta-merta

mencerminkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan optimal pada seluruh aspek.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DINPMPTSP Purworejo 2020–2025

Tahun	Nilai IKM	Kategori
2020	85,67	Baik
2021	92,74	Sangat Baik
2022	94,39	Sangat Baik
2023	95,48	Sangat Baik
2024	96,39	Sangat Baik
2025	96,42	Sangat Baik

Tabel 1 menunjukkan perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo selama periode 2020–2025. Data tersebut memperlihatkan adanya tren peningkatan nilai IKM secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai IKM tercatat sebesar 85,67 dengan kategori Baik. Selanjutnya, sejak tahun 2021 hingga 2025, nilai IKM mengalami peningkatan signifikan dan secara konsisten berada pada kategori Sangat Baik. Peningkatan nilai IKM dari 92,74 pada tahun 2021 menjadi 96,42 pada tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan perizinan. Tren ini menunjukkan bahwa upaya inovasi pelayanan, termasuk penerapan Sistem Perizinan Dalam Jaringan (Si Ida), telah memberikan dampak positif terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi proses perizinan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.

Capaian nilai IKM yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perizinan telah berjalan optimal pada seluruh aspek. Nilai IKM bersifat agregat dan lebih merepresentasikan persepsi kepuasan pengguna layanan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika proses implementasi kebijakan, termasuk kendala sumber daya, koordinasi antar organisasi, serta kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital. Oleh karena itu, meskipun data IKM menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik, tetap diperlukan analisis lebih mendalam mengenai proses implementasi kebijakan Si Ida untuk memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan publik seringkali menghadapi berbagai kendala administratif, sumber daya, maupun lingkungan implementasi. Grindle (dalam Soufika R., 2019) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi (*implementation context*), termasuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan

kondisi tersebut, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi Si Ida sebagai kebijakan pelayanan publik berbasis e-government di tingkat daerah. Implementasi kebijakan dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Djoko, 2020). Dengan demikian, implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup interaksi antar aktor, ketersediaan sumber daya, serta sikap pelaksana kebijakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah: bagaimana implementasi Sistem Perizinan Dalam Jaringan (Si Ida) dalam pelayanan publik di DINPMPTSP Kabupaten Purworejo, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasinya? Penelitian ini menganalisis implementasi Si Ida menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa kinerja implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor (Van Meter & Van Horn dalam Djoko, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pelayanan perizinan berbasis elektronik mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dari aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, berbagai studi juga menegaskan bahwa tantangan implementasi masih sering muncul, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar organisasi, dan literasi digital masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat pentingnya analisis implementasi kebijakan dalam pelayanan perizinan berbasis elektronik. Penelitian Marlina (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem perizinan online mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi proses perizinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi. Selanjutnya, Silalahi (2019) menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya dipengaruhi oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksana dalam menerapkan standar pelayanan serta kemampuan organisasi dalam merespons kebutuhan pengguna layanan. Penelitian lain oleh Soufika R. (2019) yang mengkaji implementasi kebijakan publik menemukan bahwa faktor lingkungan sosial dan koordinasi antar lembaga menjadi penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai implementasi pelayanan publik berbasis digital, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi Sistem Perizinan Dalam Jaringan (Si Ida) menggunakan model Van Meter dan Van Horn di Kabupaten Purworejo masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi dan kebaruan dengan mengkaji secara komprehensif faktor-faktor implementasi kebijakan perizinan online dalam konteks pemerintah daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Sistem Perizinan Dalam Jaringan (Si Ida) dalam pelayanan publik di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses implementasi kebijakan, peran aktor pelaksana, serta konteks organisasi dan lingkungan kebijakan. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di DINPMPTSP Kabupaten Purworejo sebagai instansi pelaksana utama Si Ida.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, terdiri atas pejabat dan staf DINPMPTSP yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Si Ida serta pengguna layanan sebagai informan pendukung. Data dokumentasi meliputi peraturan, standar operasional prosedur (SOP), laporan kinerja, dan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang relevan untuk memperkuat temuan lapangan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan kerangka Van Meter dan Van Horn, yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keandalan dan validitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Perizinan Dalam Jaringan (Si Ida) di DINPMPTSP Kabupaten Purworejo secara umum telah berjalan dengan cukup efektif sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengajukan perizinan secara daring, mengunggah dokumen persyaratan, memantau proses perizinan, serta menerima hasil pelayanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa Si Ida berkontribusi dalam mengurangi antrian, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi pelayanan.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi Si Ida tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, perilaku aparatur, koordinasi antar lembaga, serta kondisi sosial masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, analisis implementasi Si Ida perlu dipahami secara komprehensif melalui variabel-variabel implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Pembahasan berikut menguraikan secara rinci hasil penelitian berdasarkan enam variabel implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Ditinjau dari aspek standar dan sasaran kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Si Ida telah didukung oleh standar dan sasaran kebijakan yang

relatif jelas. DINPMPTSP Kabupaten Purworejo memiliki pedoman operasional dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur alur pelayanan perizinan melalui sistem daring. Standar tersebut menjadi acuan bagi aparatur dalam melaksanakan pelayanan, sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara seragam dan terstruktur.

Dari sisi aparatur pelaksana, pemahaman terhadap standar dan sasaran kebijakan dinilai cukup baik. Petugas mengetahui tujuan utama penerapan Si Ida, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat. Kejelasan sasaran kebijakan ini membantu aparatur dalam menyesuaikan pola kerja dari pelayanan manual menuju pelayanan berbasis digital. Namun, penelitian menemukan bahwa pemahaman tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Sebagian masyarakat, khususnya pemohon dengan keterbatasan literasi digital, masih mengalami kesulitan dalam memahami alur pelayanan dan persyaratan perizinan melalui Si Ida. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun standar kebijakan telah dirumuskan dengan baik, pencapaian sasaran kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan aspek sosialisasi dan pendampingan agar standar kebijakan tidak hanya dipahami oleh pelaksana, tetapi juga oleh seluruh kelompok masyarakat.

Sumber Daya

Variabel sumber daya menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Si Ida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi sumber daya manusia, DINPMPTSP Kabupaten Purworejo telah memiliki aparatur yang cukup kompeten dalam mengoperasikan sistem perizinan daring. Petugas pelayanan telah terbiasa menggunakan aplikasi Si Ida dan mampu memberikan penjelasan teknis kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Namun demikian, keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri, terutama pada periode tertentu dengan volume permohonan perizinan yang tinggi. Beban kerja yang meningkat berpotensi memengaruhi kecepatan dan konsistensi pelayanan apabila tidak diimbangi dengan penambahan atau penguatan kapasitas SDM. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur perlu didukung dengan kuantitas sumber daya yang memadai agar implementasi kebijakan berjalan optimal. Dari sisi sumber daya non-manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, seperti perangkat komputer dan jaringan internet, secara umum mendukung implementasi Si Ida. Namun, penelitian juga menemukan adanya kendala teknis, seperti gangguan sistem atau koneksi internet yang tidak stabil, yang dapat memperlambat proses pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan implementasi Si Ida memerlukan pemeliharaan sistem dan dukungan infrastruktur teknologi yang berkelanjutan.

Hubungan Antar Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dan koordinasi antar organisasi dalam implementasi Si Ida tergolong cukup baik, terutama koordinasi internal di

lingkungan DINPMPTSP Kabupaten Purworejo. Pembagian tugas antar bidang telah dilakukan secara jelas, sehingga masing-masing unit memahami perannya dalam proses pelayanan perizinan. Koordinasi eksternal dengan perangkat daerah lain yang terlibat dalam proses perizinan, seperti instansi teknis pemberi rekomendasi, juga telah terjalin. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan dalam proses verifikasi atau penerbitan rekomendasi teknis dari instansi terkait. Keterlambatan ini berpengaruh terhadap waktu penyelesaian perizinan meskipun sistem Si Ida telah dirancang untuk mempercepat pelayanan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Si Ida tidak hanya bergantung pada kinerja DINPMPTSP sebagai pelaksana utama, tetapi juga sangat ditentukan oleh sinergi antar organisasi pendukung. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi dan integrasi antar instansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan berbasis digital.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Si Ida menunjukkan kecenderungan yang positif. Aparatur DINPMPTSP Kabupaten Purworejo dinilai memiliki sikap terbuka terhadap perubahan dan bersedia beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis digital. Sikap ini tercermin dari kesediaan petugas untuk mempelajari sistem baru dan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Penelitian juga menemukan bahwa aparatur memiliki tingkat tanggung jawab yang cukup tinggi dalam melaksanakan pelayanan. Petugas tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berupaya memastikan bahwa pemohon memahami proses perizinan yang sedang dijalani. Karakteristik ini berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Karakteristik agen pelaksana juga dipengaruhi oleh beban kerja dan tuntutan pelayanan. Apabila tekanan kerja meningkat tanpa dukungan organisasi yang memadai, hal ini berpotensi memengaruhi kinerja aparatur. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur menjadi penting untuk menjaga kualitas implementasi kebijakan dalam jangka panjang.

Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi sosial masyarakat menjadi faktor yang cukup signifikan dalam implementasi Si Ida. Perbedaan tingkat pendidikan dan literasi digital masyarakat memengaruhi kemampuan mereka dalam memanfaatkan sistem perizinan daring. Masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi relatif mudah mengakses Si Ida, sementara kelompok masyarakat tertentu masih membutuhkan pendampingan langsung dari petugas. Dari sisi ekonomi, implementasi Si Ida memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sistem ini mampu menekan biaya administrasi, mengurangi kebutuhan transportasi, serta mempercepat proses perizinan. Manfaat ekonomi ini menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk mulai beralih ke pelayanan perizinan berbasis digital. Sementara itu, dukungan politik dari pemerintah daerah terhadap digitalisasi pelayanan publik menjadi faktor pendukung penting bagi

implementasi Si Ida. Komitmen pemerintah daerah tercermin dari keberlanjutan penggunaan sistem serta dukungan kebijakan terhadap inovasi pelayanan publik. Kondisi politik yang kondusif ini memberikan ruang bagi DINPMPTSP untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan perizinan.

Disposisi Implementor

Disposisi implementor dalam implementasi Si Ida menunjukkan sikap yang mendukung tujuan kebijakan. Aparatur pelaksana memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan penerapan sistem perizinan daring dan menunjukkan komitmen untuk menjalankannya secara konsisten. Sikap positif ini menjadi modal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian menemukan bahwa implementor cenderung responsif terhadap keluhan dan kendala yang dihadapi masyarakat. Petugas berupaya memberikan solusi, baik melalui pendampingan langsung maupun penjelasan teknis terkait penggunaan sistem. Sikap responsif ini berkontribusi terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Namun demikian, disposisi implementor juga perlu didukung oleh sistem insentif dan penguatan kapasitas yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, komitmen aparatur berpotensi menurun seiring meningkatnya beban kerja. Oleh karena itu, keberlanjutan implementasi Si Ida memerlukan perhatian tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Perizinan Dalam Jaringan (Si Ida) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo secara umum telah berjalan dengan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan Si Ida mampu menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan transparansi, serta memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat dan pelaku usaha. Keberhasilan implementasi ini tercermin dari kemudahan akses layanan dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berada pada kategori sangat baik.

Ditinjau dari variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan dengan cukup jelas dan dipahami oleh aparatur pelaksana, meskipun belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan Si Ida, namun masih dihadapkan pada keterbatasan jumlah aparatur dan kendala teknis tertentu. Hubungan antar organisasi menunjukkan koordinasi yang cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan integrasi antar instansi teknis yang terlibat dalam proses perizinan. Lebih lanjut, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor menunjukkan sikap yang positif dan komitmen yang tinggi dalam mendukung tujuan kebijakan. Di sisi lain, kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi efektivitas implementasi Si Ida, terutama terkait perbedaan tingkat literasi digital. Dengan

demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan perizinan berbasis e-government tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, aktor pelaksana, serta lingkungan kebijakan secara menyeluruh.

Referensi

- Afrida, D. & Parwiyanto, H. (2020) 'Inovasi Sistem Perizinan Dalam Jaringan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo', *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), pp. 16–31.
- E-Government Issues in Developing Countries Using TOE and UTAUT Frameworks: A Systematic Review (2024) Systematic Literature Review
- Implementation E-Government in supporting of online-based Service Quality and Accessibility (2022)
- Implementation of the Electronic Licensing Service Program in Public Service at One-Stop Investment Office of Bengkulu Province (2024)
- Prasetyo, E., Isnaini & Adam (2021) 'Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai', *PERSPEKTIF*, 10(2), 710–727.
- Pratiwi, R., et al. (2020) 'One Door Integrated Service Performance of The Department of Investment and One Door Integrated Services (DPMPTSP) of Palembang City, South Sumatera Province'
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha. Purworejo: Sekretariat Daerah.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha. Purworejo: Bupati Purworejo.
- Purwani, M.T. & Suryawati, R. (2021) 'Implementasi Program Sistem Perizinan Online (SPION) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 273–292.
- Rachmi, S. (2019) 'Implementasi Pelayanan Perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang', *Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara*.
- Shahi (2023) 'Policy Implementation Challenges in Developing Countries (Nepal)', (library research)
- The Impact of Electronic Government Policy on Transparency and Accountability in Public Services (2024)
- Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (2021) Peraturan Menteri Investasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: BKPM.
- Pemerintah Republik Indonesia (2021) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Sekretariat Negara.